



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 10117-10129

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Kinerja Badan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Jayapura dalam Menanggulangi Pencemaran Lingkungan di Teluk Youtefa

Mesak Rumsowek^{1✉}, Roland Everson Binur², Lazarus Ramandei³

(1) Program Studi Administrasi Publik, Universitas Cenderawasih Jayapura Papua

(2) Program Studi Administrasi Perkantoran, Universitas Cenderawasih Jayapura Papua

(3) Jurusan Perencanaan Wilayah Kota, Universitas Cenderawasih Jayapura Papua

Email : ramandeylaz@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kinerja pemerintah daerah dalam hal ini melalui Badan Lingkungan Hidup Kota Jayapura dalam menanggulangi Pencemaran di Teluk Youtefa. Kinerja dinilai dengan menggunakan beberapa indikator yaitu produktivitas, responsivitas dan akuntabilitas. Selain itu penelitian ini juga melihat faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kinerja Badan Lingkungan Hidup. Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Jayapura dan dilakukan di Badan Lingkungan Hidup Kota Jayapura. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini berusaha untuk menggambarkan tentang suatu keadaan atau fenomena sosial tertentu dan melakukan penilaian mengenai permasalahan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik dokumentasi dan wawancara. Data menggunakan data primer dan sekunder, data primer didapat langsung dari informan yang terkait dengan kegiatan yang mengakibatkan pencemaran di Teluk Youtefa baik dari Badan Lingkungan Hidup maupun dari masyarakat. Sedangkan data sekunder berasal dari buku-buku, dokumen dan sumber informasi lain yang terkait dengan penelitian. Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum pelaksanaan kegiatan menanggulangi pencemaran di Teluk Youtefa telah dilaksanakan. Namun dari hasil yang dicapai belum menunjukkan hasil yang maksimal, dimana masih terjadi pencemaran air. Sehingga penelitian ini ingin mengetahui kinerja Badan Lingkungan Hidup maupun dari masyarakat untuk ikut mancegah terjadinya pencemaran lingkungan. Namun demikian Badan Lingkungan Hidup sebagai aparat pelaksana sudah berusaha untuk menanggulangi pencemaran. Berdasarkan hasil penelitian maka BLH perlu meningkatkan produktivitasnya terutama pada kegiatan pencegahan, pengawasan dan penertiban.

Kata kunci : *kinerja, pencemaran air, limbah industri, rumah tangga*

Abstract

This study aims to describe the performance of local governments in this regard through the Environmental Agency in Jayapura tackling pollution in the Bay of Youtefa. Performance is assessed using several indicators apply productivity, responsiveness and accountability. In addition to that the study also date back to the factors that support and hinder the performance of the Environmental Agency. The research was filmed in the town of Jayapura and conducted at the Environmental Agency of the town of Jayapura. This type of research is qualitative, descriptive research is trying to menggambarkan about a situation or social phenomenon specific acupuncture and do an assessment regarding the issue of research. Data collection is carried out by technical documentation and interviews. Data using primary and secondary data, primary data obtained directly from informants associated with activities that result in contamination in the Bay of Youtefa both from the Environmental Agency as well as from the community. While secondary data derived from books, documents and other sources of information related to research. From the results of research can be drawn the conclusion that in general the implementation of activities tackling pollution in the Bay Youtefa tlah implemented. But from the results achieved has not shown maximum results, these is still going on air pollution. So this research would like to know the performance of the Environmental Agency or from the community to join the mancegah occurrence of environmental pollution. However, the Environmental Agency as implementing apparatus s trying to cope with pollution. Based on the research results thus improving its productivity mainly tagline BLH authenticity on the activities of prevention, monitoring and curbing.

Keywords: performance, industrial waste, water pollution, household

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya (Keraf, 2010). Lingkungan hidup ini terdiri dari 3 komponen utama yaitu komponen fisik (abiotik), komponen abiotik dan komponen kultur (Rusdina, 2015).. Dalam proses pelaksanaan pembangunan ketiga komponen itu kemungkinan akan mengalami perubahan atau lebih dikenal dengan kata akan terkena dampak. Dampak yang bersifat positif sangat diharapkan oleh manusia untuk meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidup (Manik, 2018). Sedangkan dampak yang bersifat negatif memang tidak diharapkan karena dapat menurunkan kualitas dan kenyamanan hidup, harus dapat diatasi dengan sebaik-baiknya.

Dinamika perkembangan hidup manusia menunjukkan bahwa semakin modern kehidupan manusia, semakin besar pula kerusakan dan pencemaran lingkungan yang ditimbulkannya (Pramudyanto, 2014). Di samping itu perkembangan kehidupan tersebut

juga menyebabkan semakin menipisnya sumber daya alam di bumi ini (Adnan dkk., 2008). Jika kegiatan kelompok masyarakat jaman dulu hanya menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan dalam jumlah minimal, maka kegiatan kelompok masyarakat jaman sekarang ternyata menimbulkan kerusakan yang berlipat ganda, sehingga Pemerintah selaku penyelenggara negara wajib mengeluarkan kebijakan di bidang lingkungan hidup secara nasional (Sachoemar & Wahjono, 2018).

Prinsip-prinsip pengelolaan hidup di Indonesia telah dirumuskan salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam undang-undang tersebut telah dirumuskan pengertian, tujuan dan asas serta sasaran maupun mekanisme dan kewenangan pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan Lingkungan Hidup diartikan sebagai upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

Tindakan pengendalian mempunyai posisi strategis untuk menjaga dan mengawasi agar fungsi lingkungan hidup terjaga baik daya dukungnya ataupun daya tampungnya. Tindakan pengendalian perusakan dan atau pencemaran lingkungan salah satunya adalah permasalahan pencemaran air. Air merupakan kebutuhan utama bagi proses kehidupan di bumi, tidak akan ada kehidupan seandainya di bumi tidak ada air. Air yang bersih sangat didambakan oleh manusia, baik untuk keperluan sehari-hari, untuk keperluan industri, pertanian dan lain sebagainya. Saat ini air menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian khusus. Untuk mendapatkan air yang baik sesuai dengan standar tertentu sekarang bukanlah suatu yang mudah karena air sudah banyak tercemar oleh berbagai macam limbah dari kegiatan manusia, baik itu limbah industri, limbah dari kegiatan rumah tangga, maupun limbah dari kegiatan yang lainnya. (Ramandei & Nawipa, 2022). Pembuangan limbah secara langsung inilah yang menjadi penyebab utama terjadinya pencemaran air. Limbah (baik berupa zat padat maupun zat cair) yang masuk ke air akan menyebabkan terjadinya penyimpangan dari keadaan normal air (Febriwahyudi & Hadi, 2012).

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya (Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 11). Kebijakan Pengendalian Pencemaran Air, secara nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82

tahun 2001, tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Pertumbuhan ekonomi dapat terjadi akibat dari pembangunan di berbagai bidang. Baik dalam bidang industri, jasa pemukiman, pendidikan maupun transportasi. Seiring dengan perkembangan perkotaan tersebut, maka terjadi alih fungsi lahan yang tadinya merupakan lahan pertanian yang tidak terbangun menjadi daerah terbangun (*built up area*). Perubahan ini menyebabkan peningkatan kepadatan penduduk dan kepadatan pemukiman. Perluasan lahan terbangun baik difungsikan sebagai pemukiman, perdagangan maupun industri secara otomatis akan memicu permasalahan penurunan kualitas lingkungan. Di bidang industri sendiri jika tidak dilakukan pengelolaan yang tepat dari sisa buangan industri, akan menimbulkan berbagai masalah. Permasalahan tersebut antara lain masalah banjir, sampah, polusi udara dan pencemaran air. Di dalam kegiatan industri, maupun rumah tangga, air yang telah digunakan sering langsung dibuang ke lingkungan karena kandungan bahan kimianya dapat mencemari lingkungan, sehingga beban lingkungan semakin berat terutama tercemarnya dalam sungai yang ikut mengakibatkan tercemarnya Teluk Youtefa.

Kota Jayapura merupakan kota yang sangat pesat perkembangannya di Provinsi Papua sehingga letaknya yang sangat strategis, yang memberikan keuntungan yang sangat menggiurkan bagi para pelaku usaha untuk menanamkan modalnya di daerah ini. Namun pertumbuhan industri juga membawa pengaruh buruk terhadap lingkungan kota, terutama pada sungai-sungai yang ada di Kota Jayapura. Sungai-sungai yang mengalir di sini mengalami pencemaran yang mengkhawatirkan. Sedikitnya ada 4 sungai yang melewati wilayah Kota Jayapura sudah dalam kondisi yang cukup mengkhawatirkan.

Kota Jayapura sebagai kota yang pertumbuhannya sangat pesat, terutama di bidang industri dengan berbagai limbah yang dikeluarkan dari proses produksi, memiliki potensi dampak pencemaran. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup, Pasal 9 mewajibkan setiap orang yang akan melakukan pembuangan air limbah ke sumber-sumber air terlebih dahulu melakukan pengelolaan air limbah yaitu dengan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah). Di Kota Jayapura terdapat beberapa industri, baik industri makanan, industri mebel, industri tekstil, dll, yang ikut menceemari sungai-sungai yang berdampak pada pencemaran Teluk Youtefa, seperti Sungai Hanyaan, Acai, Sbohonry

Permasalahan pencemaran lingkungan di Kota Jayapura di tangani oleh Badan Lingkungan Hidup kota Jayapura. Tugas dari Badan Lingkungan Hidup adalah

menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup. Badan Lingkungan Hidup Kota Jayapura mengaku telah melakukan tindakan preventif maupun represif tetapi permasalahan masih ditemui. Untuk mengatasi permasalahan pencemaran karena air limbah, maupun pencemaran di sungai-sungai diperlukan adanya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga dan menanggulangi pencemaran lingkungan terutama yang berdampak pada pencemaran teluk Youtefa dan kemampuan dari Pemerintah kota dalam menanggulangi pencemaran air limbah secara bertanggungjawab, sehingga kinerja penanggulangan pencemaran baik limbah industri maupun keluarga bisa diatasi dengan baik.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bermaksud memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta tertentu (Gunawan, 2013). Arah kajian penelitian kualitatif adalah pada perilaku manusia sehari-hari dalam keadaan rutin secara apa adanya. Berdasarkan arah kajiannya penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai kinerja Badan Lingkungan Hidup dalam menanggulangi pencemaran di Teluk Youtefa. Karena penelitian ini berusaha untuk menggambarkan, menafsirkan dan menganalisis kinerja Badan Lingkungan Hidup Kota Jayapura dalam menanggulangi Pencemaran di Teluk Youtefa, maka penelitian ini dikategorikan sebagai bentuk penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan keadaan fenomena sosial tertentu.

Lokasi penelitian

Lokasi Penelitian adalah di Badan Lingkungan Hidup Kota Jayapura. Adapun pemilihan lokasi tersebut karena: Badan Lingkungan Hidup merupakan Badan atau Lembaga pemerintahan yang diberi kewenangan oleh pemerintahan di bidang perlindungan lingkungan hidup.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Untuk mengumpulkan informasi dari sumber data ini diperlukan teknik wawancara, yang dalam penelitian kualitatif khususnya dilakukan dalam bentuk wawancara mendalam dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada informan. Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kepala Kampung Nafri, Enggros, Tobati yang juga

merasakan dampak akibat kinerja Badan Lingkungan Hidup.

2. Observasi

Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, benda serta rekaman gambar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mencari, mengumpulkan, dan mempelajari dokumen yang relevan dengan penelitian berupa arsip, laporan, peraturan, dokumen, dan literatur lainnya.

Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, maka teknik pengambilan sampel dilakukan secara selektif dengan menggunakan pertimbangan secara teoritis, keinginan dari peneliti, karakteristik empiris, serta kebutuhan dan tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penarikan sampel yaitu *purposive sampling* atau sampel bertujuan, dimana peneliti cenderung menggunakan atau memilih informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap dan mengetahui permasalahannya secara lengkap tanpa didasarkan pada strata maupun random, tetapi lebih ditekankan pada tujuan tertentu (Gunawan, 2013).

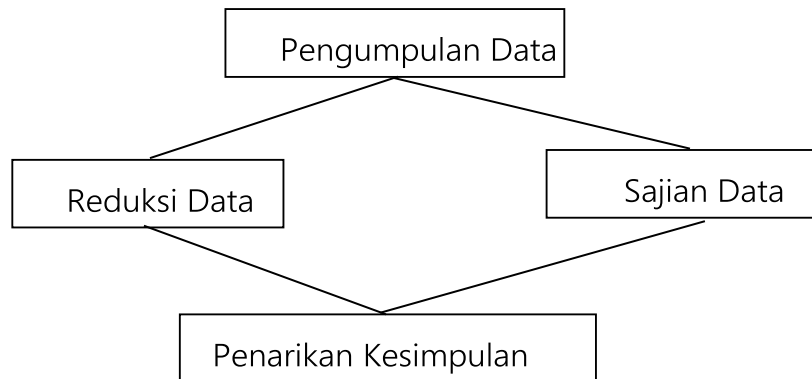
Validitas Data

Untuk menentukan keabsahan atau validitas data, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan triangulasi yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu (Moloeng, 2009). Ada 4 macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang menggunakan pemanfaatan sumber, metode, penyidik, dan teori. Dalam penelitian ini, triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber yang berarti membandingkan dan mengecek balik informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda. Ini dilakukan dengan cara membandingkan data hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Dengan demikian data yang satu akan dikontrol oleh data yang sama dari sumber lain (Bachri, 2010).

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif pada dasarnya proses analisis dilakukan bersamaan dengan proses pelaksanaan pengumpulan data. Model yang digunakan adalah model analisis yang dilakukan apabila inti data sudah diperoleh. Kemudian dilakukan penafsiran

data dimana penulis mengungkapkan dalam bentuk uraian- uraian dan penjelasan lainnya yang pada akhirnya dapat diambil kesimpulan- kesimpulan serta saran-saran sesuai dengan penelitian ini. Dalam metode interaktif ini terdapat tiga komponen analisis, yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk lebih jelasnya proses tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Model Analisis Interaktif (H.B Sutopo, 2002:96)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Penanggulangan Pencemaran Badan Lingkungan Hidup Kota Jayapura

Untuk mengatur dan mencegah agar segala kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat agar tidak menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan hidup maka pemerintah mengeluarkan UU No 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup yang mengatur segala aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Untuk mencegah pencemaran air, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, dalam peraturan pemerintah ini memuat persyaratan yang harus dipatuhi oleh pelaku kegiatan industri selama melakukan kegiatan industri. Tujuan dari PP No 82 tahun 2001 ini untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya pencemaran terhadap sumber air yang diakibatkan oleh pembuangan limbah dari aktivitas industri maupun masyarakat secara keseluruhan. Untuk dapat mengetahui seberapa besar kinerja kegiatan penanggulangan Pencemaran di Teluk Youtefa oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Jayapura yang telah dicapai selama ini, berikut dijelaskan dalam bab ini dengan menggunakan indikator- indikator *produktivitas, responsivitas dan akuntabilitas*. Selain itu juga akan dibahas faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat penanggulangan Teluk Youtefa.

1. Indikator Produktivitas

Produktivitas dapat dipahami sebagai rasio antara *input* dan *output*, artinya perbandingan sejauh mana upaya yang dilakukan dengan hasil yang diperoleh dalam periode tertentu. Berkaitan dengan produktivitas ini kinerja Badan Lingkungan Hidup dapat diukur dari pencapaian target yang telah ditetapkan dengan hasil realisasi. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pihak Badan Lingkungan Hidup dalam menanggulangi pencemaran air limbah industri Batik. Kegiatan-kegiatan ini mengacu pada Perda No 6 Tahun 2008 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah pencegahan, penyuluhan, pengawasan dan penertiban.

Dalam usaha untuk mengendalikan permasalahan lingkungan hidup pemerintah Daerah Kota Jayapura membentuk Instansi Pengendalian Lingkungan Hidup, di Kota Jayapura instansi tersebut adalah Badan Lingkungan Hidup. Badan Lingkungan Hidup wajib melakukan pemantauan terhadap setiap usaha dan atau kegiatan secara periodik dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan yang dilakukan Badan lingkungan Hidup bersifat pembinaan. Badan Lingkungan Hidup menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan aktivitas industri yang dilakukan oleh masyarakat pelaku industri berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 1. Baku mutu air berdasarkan PP No 82 Tahun 2001

Kelas	Baku Mutu										
	BOD	COD	pH	Seng	Tembaga	Krom	Nikel	Timbal	Nitrit	Nitrat	Kadmium
Kelas I	2	-	6-9	0.05	0.02	0.05	-	0.03	0.06	10	0.01
Kelas II	3	25	6-9	0.05	0.02	0.05	10	0.03	0.06	10	0.01
Kelas III	6	50	6-9	0.05	0.02	0.05	20	0.03	0.06	20	0.01
Kelas IV	12	100	5-9	2	0.2	1	20	1	-	20	0.01

Sumber : BLH Kota Jayapura

Keterangan :

Kelas I : air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air minum

Kelas II : air yang peruntukannya dapat digunakan untuk sarana/prasarana rekreasi air, pengelolaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman

Kelas III : air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar,

peternakan air untuk mengairi pertanian

Kelas IV : air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanian

Dari monitoring keadaan sungai-sungai yang ada menunjukkan terjadi kondisi pencemaran yang ada di beberapa sungai yang menunjukkan kenaikan dan penurunan beberapa kandungan yang terkontaminasi dalam air. Badan Lingkungan Hidup memberikan alasan bahwa kondisi tersebut disebabkan oleh aktifitas kegiatan masyarakat serta aktifitas produksi kecil, maupun bengkel bengkel dan sangat banyak jumlahnya sehingga limbah yang dihasilkan juga banyak. Dari pemantauan yang dilakukan di beberapa titik sungai, pencemaran yang terjadi tidak bisa ditetapkan bahwa pencemaran yang disebabkan oleh industri di sekitar situ namun lebih kerah aktifitas masyarakat baik yang mendiami hulu hingga hilir setiap sungai.

2. Indikator Responsivitas

Responsivitas di sini dilihat dari tanggapan Badan Lingkungan Hidup terhadap keinginan-keinginan dari masyarakat baik masyarakat umum maupun masyarakat pelaku industri. Dalam operasionalnya Badan Lingkungan Hidup harus mampu menanggapi keluhan, tuntutan, kebutuhan para pelaku industri dan masyarakat sehingga penanggulangan terhadap pencemaran dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Terhadap keinginan dari pelaku industri serta masyarakat, responsivitas Badan Lingkungan Hidup dapat dikatakan baik, hal ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan Badan Lingkungan Hidup.

Dalam kegiatan sosialisasi jika ada pelaku industri dan masyarakat yang belum mengetahui suatu permasalahan petugas akan memberi informasi yang dibutuhkan, dalam kegiatan pengawasan Badan Lingkungan Hidup memberikan bantuan terhadap pelaksanaan pengolahan limbah kepada industri yang belum melaksanakan seperti ketentuan yang telah ditetapkan serta kepada masyarakat melalui kegiatan penyuluhan serta himbauan. Terkait dengan penertiban, petugas memberikan waktu bagi industri untuk memperbaiki apa yang tidak atau belum sesuai tersebut sebelum diberi surat peringatan tertulis, dalam tahapan ini pelaku industri juga diberikan kesempatan untuk menjelaskan apa yang terjadi. Sementara itu responsivitas terhadap masyarakat umum juga cukup baik dengan adanya peran serta dari masyarakat dalam memberikan saran, pertimbangan, pendapat bahkan menyampaikan keluhan.

3. Indikator Akuntabilitas

Akuntabilitas sebagai kriteria untuk mengetahui sejauh mana Badan Lingkungan Hidup Kota Jayapura bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki tingkat akuntabel, jika kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Akuntabilitas Badan Lingkungan Hidup secara vertikal adalah kepada Pemerintah Daerah, dalam hal ini adalah Wali Kota Jayapura. Sedangkan akuntabilitas Badan Lingkungan Hidup secara horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Pertanggungjawaban Badan Lingkungan Hidup kepada pemerintah bukan hanya masalah dana saja, tetapi juga pada pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup apakah memenuhi target yang ditetapkan pemerintah, dan mengacu pada aturan-aturan yang sudah ditetapkan atau tidak. Pelaksanaan kegiatan dalam menanggulangi pencemaran air limbah industri dan rumah tangga ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dan sesuai dengan kebijakan organisasi, karena pada dasarnya mengacu pada aturan dari pemerintah dari sisi hukum dan undang-undangnya.

Pertanggungjawaban Badan Lingkungan Hidup untuk menanggulangi Pencemaran di Teluk Youtefa belum memperoleh hasil yang maksimal karena masih terjadi beberapa kasus pencemaran. Pertanggungjawaban Badan Lingkungan Hidup memang bukan hanya pada pencemaran industri saja tetapi juga terhadap masyarakat secara luas, tetapi ada banyak program lain juga yang membutuhkan penanganan. Sedangkan pertanggungjawaban Badan Lingkungan Hidup terhadap masyarakat lebih kepada pelaksanaan kegiatan. Pada kegiatan penyuluhan, Badan Lingkungan Hidup sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Hanya saja pada pengawasan dan penertiban Badan Lingkungan Hidup kurang maksimal dan masih terjadi permasalahan pencemaran di masyarakat.

Faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat kinerja Badan Lingkungan Hidup Kota Jayapura dalam menanggulangi Teluk Youtefa

1. Faktor Pendukung

a. Dari Pihak Badan Lingkungan Hidup

Perhatian dari pemerintah sangat besar terhadap pencemaran Teluk Youtefa, sehingga melalui beberapa Peraturan Daerah di Kota Jayapura lebih mengarah

pada terciptanya kondisi lingkungan, Kebersihan dan lain-lain. Pemerintah juga mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kinerja Badan Lingkungan Hidup dalam menanggulangi masalah pencemaran lingkungan. Petugas dari Badan Lingkungan Hidup juga antusias mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun oleh instansi non pemerintah.

b. Dari Pihak Masyarakat

Antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan penyuluhan sudah merupakan awal yang baik. Meskipun dalam pengawasan dan penertiban masih ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan namun Badan Lingkungan Hidup mencoba mengatasi dengan sebaik- baiknya. Sebenarnya dari masyarakat sudah ada peningkatan kesadaran terhadap lingkungan hidup. Badan Lingkungan Hidup juga dibantu oleh LSM yang peduli pada kelestarian lingkungan, yang turut membantu memantau keadaan lingkungan.

2. Faktor Penghambat

a. Dari Pihak Badan Lingkungan Hidup

Dalam pelaksanaan suatu program, dana merupakan faktor penting yang sangat menentukan. Tanpa adanya dukungan dana yang memadai mustahil suatu kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Sumber dana untuk pelaksanaan penanggulangan pencemaran air air limbah industri dan rumah tangga berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jayapura yang setiap tahun mengalokasikan dana untuk kegiatan penanggulangan pencemaran. Namun alokasi dana yang ada masih kurang untuk mendapatkan hasil yang maksimal, sehingga Badan Lingkungan Hidup Kota Jayapura sebagai organisasi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam permasalahan penanggulangan pencemaran ini berusaha mendayagunakan sumber daya yang ada dengan seefektif dan seefisien mungkin. Terbatasnya anggaran yang dimiliki merupakan salah satu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan pencemaran yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup kotaKota Jayapura. Padahal perkembangan serta kegiatan industri/ pabrik kecil bertumbuh begitu pesatnya di Kota Jayapura dan terus berjalan dan cenderung meningkat. Sebagai akibatnya adalah kegiatan penyuluhan, pengawasan, penertiban.

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang harus dipersiapkan dan dipenuhi oleh Badan Lingkungan Hidup dalam setiap kegiatan yang dilakukan untuk menanggulangi pencemaran air limbah industri dan rumah tangga. Dilihat

dari sisi kuantitas, jumlah petugas masih kurang, terlebih lagi setelah sebagian besar pegawai telah ditarik sebagai pegawai provinsi setelah berlakunya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru sesuai Perda Nomor 14 Tahun 2008. Sedangkan dari sisi kualitas, pengetahuan yang dimiliki oleh petugas Badan Lingkungan Hidup belum memadai mengingat tugas- tugas dari Badan Lingkungan Hidup mencakup berbagai bidang ilmu pengetahuan.

b. Dari Pihak Masyarakat

Kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap penanggulangan pencemaran yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup dapat dikatakan masih kurang. Masyarakat pelaku industri batik terkadang kurang memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pelaksanaan kegiatan industri mereka. Pencemaran dan perusakan lingkungan bisa diminimalisir jika pemilik industri batik menggunakan alat-alat pengendali pencemaran. Tetapi dalam prakteknya penggunaan alat-alat ini memerlukan biaya yang tidak sedikit yang berpengaruh pada bertambahnya biaya produksi. Pencemaran dan perusakan lingkungan bisa diminimalisir bahkan dicegah jika pemilik industri menggunakan alat- alat pengendali pencemaran serta pro aktif dari masyarakat

SIMPULAN

1. Sikap petugas dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan pencemaran khususnya pencemaran air limbah industri dan rumah tangga sudah cukup baik, namun masih terdapat pelaku industri yang tidak peduli terhadap kegiatan.
2. Secara umum pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan penanggulangan sudah cukup baik, namun masih saja terjadi pelanggaran. Hal ini karena pengawasan yang kurang maksimal karena jumlah petugas yang kurang memadai.
3. Penegakan terhadap PP No. 82 Tahun 2001 belum dilaksanakan secara optimal oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan penertiban, dimana belum diterapkannya secara tegas sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku industri. Dalam peraturan ini tertulis bahwa "Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin" pasal 38 ayat 1 dan salah satu syarat yang terdapat dalam perijinan adalah kewajiban untuk mengolah limbah. Sebagaimana yang tertulis "Dalam persyaratan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicantumkan kewajiban untuk mengolah limbah" Pasal 38 ayat 2 (1).

4. Dilihat dari monitoring sungai tahun 2010-2017 sesuai informasi dari BLH Kota Jayapura menunjukkan terjadinya tingkat pencemaran yang cukup tinggi terhadap kandungan zat kimia di dalam air sungai, hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah menanggulangi pencemaran belum menunjukkan hasil yang optimal. Namun hal ini bukan hanya karena kinerja Badan Lingkungan Hidup yang kurang, namun juga dipengaruhi oleh beberapa faktor dari luar organisasi. Diantaranya adalah kesadaran pelaku industri, mereka enggan mengolah limbah sisa produksinya karena membutuhkan proses yang rumit dan dana yang besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, H., Tadjudin, D., Yuliani, E. L., Komarudin, H., Lopulalan, D., Siagian, Y. L., & Munggoro, D. W. (Eds.). (2008). *Belajar dari Bungo: mengelola sumberdaya alam di era desentralisasi*. CIFOR.
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan validitas data melalui triangulasi pada penelitian kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10 (1), 46-62.
- Febriwahyudi, C. T., & Hadi, W. (2012). Resirkulasi Air Tambak Bandeng Dengan Slow Sand Filter. *Jurnal Teknik Pomits*, 1(1), 1-5.
- Gunawan, I. (2013). Metode penelitian kualitatif. *Jakarta: Bumi Aksara*, 143.
- Keraf, A. S. (2010). *Etika lingkungan hidup*. Penerbit Buku Kompas.
- Manik, K. E. S. (2018). *Pengelolaan lingkungan hidup*. Yogyakarta: Kencana.
- Moloeng, L. J. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. *Remaja Rosdakarya*, 14.
- Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air
- Perda No 6 Tahun 2008 tentang Pengendalian Lingkungan H
- Pramudyanto, B. (2014). Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan di Wilayah Pesisir. *J. Lingkar Widyaishwara*, 1(4), 21-40.
- Ramandei, Lazarus & Nawipa, Sepo. (2022). Community Participation in Waste Management in Hamadi South, South Jayapura District, Jayapura City. 2. 13-23.
- Rusdina, A. (2015). Membumikan etika lingkungan bagi upaya membudayakan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. *Jurnal Istek*, 9(2).
- Sachoemar, S. I., & Wahjono, H. D. (2018). Kondisi pencemaran lingkungan perairan di Teluk Jakarta. *Jurnal Air Indonesia*, 3(1).
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- UU No 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup